

## KESEJAHTERAAN SOSIAL: SEBUAH PERSPEKTIF DIALEKTIS

Balthasar Watunglawar<sup>1</sup>, Katarina Leba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Jember, Jember, Indonesia

<sup>1</sup>[watungballa@gmail.com](mailto:watungballa@gmail.com)

<sup>2</sup>[katrinwatunglawar@gmail.com](mailto:katrinwatunglawar@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa persepsi masyarakat perihal kesejahteraan sosial yang secara tanpa sadar memengaruhi perilaku dan sikap hidup dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Perspektif dialektis menjadi objek formal penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan untuk mendapatkan data dominan, untuk dianalisis. Peneliti menganalisis data dengan cara disajikan, direduksi, dideskripsikan, dan dievaluasi. Peneliti merefleksikan dan menganalisis untuk memboboti secara kritis dari perspektif peneliti untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya terkait dengan pemenuhan barang, jasa, kepastian hukum untuk keseimbangan dan kenyamanan, serta kepentingan individu semata, melainkan sebuah kesejahteraan yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan kebaikan bersama (communal well-being & bonum communio). Perspektif dialektis kesejahteraan adalah kolaborasi hak dan kewajiban secara proporsional antara ayah-ibu-anak atau masyarakat-pemerintah-negara. Kesejahteraan membutuhkan perbaikan positif untuk penciptaan peradaban baru sebagai sintesis dan bukan repetisi. Gerakan kesejahteraan bersifat altruistik dan bukan egoistik-individualistik. Kesejahteraan menuntut pemberdayaan, maksimalisasi kinerja, peningkatan etos kerja sebagai bagian dari pengungkapan identitas dan hakekat manusia sebagai "homo vaber" atau "animal rationale".

Kata Kunci: Kesejahteraan, Dialektika, Improvisasi, Hak, Kewajiban, Altruis

#### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out, describe, and analyze people's perceptions about social welfare that unconsciously influence the behavior and attitudes of life in community and state life. Dialectical perspective is the formal object of this research. This study uses a qualitative method. Data collection techniques are carried out through literature review. Data that has been collected, classified to obtain dominant data, to be analyzed. The researcher analyzes the data by way of being presented, reduced, described, and evaluated. Researchers reflect and analyze to weigh critically from the perspective of researchers to then be concluded. The results of this study inform that social welfare is not only related to the fulfillment of goods, services, legal certainty for balance and comfort, as well as individual interests, but rather a welfare oriented towards general welfare and communal well-being & bonum communio. The welfare dielectric perspective is a proportional collaboration of rights and obligations between father-mother-child or community-government-state. Welfare requires positive improvements for the creation of new civilizations as synthesis and not repetition. The welfare movement is altruistic and not egoistic-individualistic. Welfare demands empowerment, maximizing performance, increasing work ethic as part of the disclosure of human identity and nature as "homo vaber" or "animal rationale".*

*Keywords: Welfare, Dialectics, Improvisation, Rights, Obligations, Altruism*

---

#### PENDAHULUAN

Sesungguhnya ada banyak improvosasi tentang kesejahteraan. Tidak jarang ada sebagian orang yang menghendaki sebuah kehidupan yang serba menyenangkan, yang dapat digambarkan seperti seorang pria ganteng asal Sorong-Papua Barat yang baru selesai makan, isap sebatang rokok, atau lagi mengunyah *siri-pinang*, sambil berpangku kaki dalam keadaan santai, atau seorang wanita cantik yang tidak bekerja, hanya tahu berhias diri, dan dilayani oleh pembantu. Ada juga yang menggambarkan kesejahteraan seperti sebuah keadaan di mana yang ada hanyalah hiburan, puji-pujian, pesta pora, tanpa kerja, tetapi segala sesuatu telah ada dan tersedia. Lebih ekstrim lagi, yakni sebuah keadaan yang mengungkapkan dunia lain dimana tidak ada penderitaan, beban, kerja, dan yang ada hanyalah senang, dan bersenang-senang setiap saat; bahkan bagi sebagian orang, suasana itu digambarkan seperti surga.

Tanpa sadar perspektif ini hidup dan memengaruhi cara berada setiap orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak

jarang orang saling iri hati dan dengki ketika melihat dan mengamati keadaan itu tercipta di dalam kehidupan sesamanya. Iri hati, atas cara tertentu, merupakan kritikan dan tuntutan akan ketidakadaan kesejahteraan. Lebih ironis lagi, bahkan orang akan menjadi sangat marah jika dalam kekurangan dan kemendesakan ekonomi melihat orang lain yang berkelimpahan masih saja melakukan korupsi uang negara atau hak-hak orang lain. Lihat saja kasus korupsi e-KTP yang menimpa mantan ketua DPR-RI Setya Novanto yang mengakibatkan negara mengalami kekurangan 2,3 triliun rupiah (<http://nasional.compas.com>, 2017); kasus korupsi dan suap yang terjadi di pemerintah Kota Malang, yang menimpa Moch Arief Wicaksono (mantan Ketua DPRD Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang), dan 18 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini sedang dalam status tersangka ([compas.com](http://compas.com), 2018).

Keadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu, dikonfrontir dengan korupsi dan keadaan negara Indonesia yang kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo ([Kompas.com](http://Kompas.com), 2018) masih memikul beban utang luar negeri (ULN) yang berada di kisaran 356,9 milyar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp.4.996.6 triliun (kurs Rp.14.00 per dollar AS) tentu sangat memprihatinkan dan menjengkelkan semua warga negara. Belum lagi ancaman virus corona yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia. Corona (covid-19) menjadi bagian dari kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi tatanan kehidupan bangsa pada hampir semua sektor, baik secara ekonomi, politik, social, dan budaya, termasuk bidang kehidupan beragama. Tanpa terkecuali, sector bisnis pada beberapa tempat dan Negara pun mengalami pergeseran strategi dan kebijakan. Sektor pariwisata ekonomi terancam mengalami kerugian karena kurangnya wisatawan Cina yang masuk ke Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami ancaman dari sumber yang sama, sehingga perlu mengantisipasi. Sebab, bakal terjadi lonjakan pasien jika ternyata virus itu berhasil masuk ke Indonesia. Virus korona mengakibatkan dana asing keluar dari Indonesia sehingga terjadi penurunan harga saham (Fajriha, 2020). Corona tidak hanya mengancam kenyamanan tetapi bisa

menghilangkan nyawa manusia seketika. Singkatnya, corona mengancam kesejahteraan sosial.

Perjuangan menuju kesejahteraan terkesan akan merupakan sebuah utopia belaka. Keadaan ini akan berpeluang memengaruhi setiap orang untuk berlaku semakin tertutup, apatis dan individualistis.

Penekanan datang pada keadaan tertentu, di mana tidak jarang dijumpai penuturan yang sifatnya asosial, *"ko sapa, kenapa tegur saya"*, atau *"ko pusing dengan ko pung pusing, jangan pusing dengan sa pung pusing"* (penuturan yang lazim dijumpai di masyarakat Papua). Pernyataan ini mengandung pengertian yang sifatnya apatis. Orang tidak lagi peduli dengan nasehat atau teguran orang lain, malah semakin sibuk dengan urusan pribadi semata. Hal ini mengindikasikan hilangnya nilai kesejahteraan. Perspektif kesejahteraan menjadi problematis.

Hakekat kesejahteraan mengusik sosialitas. Apakah kesejahteraan kontradiktoris dengan individualitas. Apakah kesejahteraan itu jika dikaitkan dengan konsep Adam Smit dalam *"The Wealth of Nation"* (1776) yang menyatakan bahwa kemajuan manusia dan tatanan sosial suatu masyarakat akan tercipta apabila setiap individu yang ada di dalamnya mengejar kepentingannya sendiri-sendiri.

Apakah kemajuan manusia dan tatanan sosial, kesejahteraan merupakan bias dari individualitas? Selanjutnya situasi dilematis manusia akan tercipta juga ketika kesejahteraan ingin diperjuangkan. Mana yang harus di dalahulukan dalam urusan kerja dan pelayanan untuk perjuangan sebuah kesejahteraan; kepentingan pribadi didahulukan atau kepentingan orang lain, bahkan kepentingan umum. Persepsi yang benar tentang kesejahteraan social akan sangat membantu pola hidup bermasyarakat dan bernegara yang baik dan bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiono, 2005). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan menggunakan kartu. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan untuk mendapatkan data dominan, kemudian dianalisis. Peneliti menganalisis data dengan cara data terkumpul disaji, direduksi,

dideskripsi, dan dievaluasi. Perspektif peneliti terikut melalui refleksi dan analisis untuk memboboti secara kritis untuk kemudian disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dialektik Kesejahteraan

#### a. Apa itu Dialektik?

Dialektik merupakan rangkaian deduktif, terutama dalam hubungannya dengan penyelidikan filsafat atau metafisika. Perspektif dialektis merujuk pada analisa kritis tentang konsepsi-klonsepsi untuk menentukan arti, implikasi, dan proposisi-proposisi. Hal ini juga terkait dengan seni berpikir secara logis, kritis, dan teratur, yang diawali dengan tesis, antitesis, dan sintesis (Phoenix, 2012).

Dialektik (*Dialektika*) berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah, istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno ketika *diintrodusir* pemahaman bahwa segala sesuatu berubah (*panta rei*). Kemudian Hegel menyempurnakan konsep dialektika dan menyederhanakannya dengan memaknai dialektika ke dalam trilogi tesis, anti-tesis dan sintesis. Menurut Hegel tidak ada satu kebenaran yang *absolut* karena berlaku hukum dialektik, yang *absolut* hanyalah semangat revolusionernya; perubahan/pertentangan atas tesis oleh anti-tesis menjadi sintesis (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>).

Perkembangan peradaban berproses seiring dengan permasalahan-permasalahan, fenomena-fenomena yang senantiasa menjadi sasaran pergerakan dan eksplorasi ilmiah akal budi untuk mengatasi masalah atau menemukan kebenaran. Analisis, kritik, verifikasi, pengujian, dan pembuktian menjadi sarana yang baik untuk pembaharuan kebenaran. Perolehan sebuah kebenaran tidak menjadi sebuah temuan yang bukan tidak dapat disangsikan, tetapi akan selalu diuji, dikritisi lagi karena cenderung mengalami pergeseran nilai sesuai dengan perkembangan dan perubahan jaman. Dengan demikian, pencarian kebenaran tidak pernah berhenti pada sebuah titik kepuasan.

**b. Apa itu Kesejahteraan?**

Kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang aman, selamat, tenteram, kesenangan hidup, dan kemakmuran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, 2012). Keadaan tersebut adalah keadaan yang dinilai baik yang dialami oleh manusia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>). Keadaan yang dimaksudkan juga terkait dengan insentif. Dalam organisasi, setiap pekerja tentu merasa aman karena perolehan insentif yang dinilai dapat mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini beralasan karena setiap orang membutuhkan biaya dan keuntungan dari setiap pembayaran dan penerimaan (Murphy et al, 2014).

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern dapat dimengerti sebagai sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kesejahteraan dimengerti sebagai kehidupan layak yang dialami setiap orang tanpa membeda-bedakan. Hak untuk hidup layak, baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, merupakan keadaan dimana masyarakat dinilai telah sejahtera. Jika keadaan tersebut tidak tercapai, dapat dipandang sebagai tindakan melawan HAM (Ikhwan, 2015).

Kesejahteraan juga merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (Undang-Undang No. 6 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1). Kesejahteraan adalah salah

satu aspek yang sangat penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

## 2. Orientasi Kesejahteraan: Perspektif Ideologi

Kesejahteraan mengandung pengertian yang berbeda. Hal ini dapat terjadi tergantung pula pada cara pandang setiap orang dan ideologi tertentu. Ada yang memandang kesejahteraan terletak pada kebahagiaan pribadi semata. Sejau mana seorang individu dapat secara bebas mengumpulkan dan memanfaatkan apa yang menjadi harta kekayaannya, seperti tanah dan uang. Tanah dan uang termasuk alat produksi atau modal yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan pribadi. Berorientasi pada modal atau uang, sesungguhnya bersinggungan dengan paham **kapitalisme**.

Dalam dunia ekonomi peran modal sangatlah besar, bahkan pemilik modal bisa menguasai pasar serta menentukan harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Fernand Braudel pernah menyatakan bahwa *"kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menanggung banyak risiko"* (Kunio, 1990). Modal yang dipunyai seseorang dapat digunakan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Kapitalisme adalah *a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned* (Rand, 1970). Kapitalisme merupakan sebuah sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat. Pemilik modal (kapitalis) memiliki hak penuh terhadap apa yang dimiliki. Perspektif kapitalisme memperjelas *individual ownership, market economy, competition, and profit*.

Kapitalis sebagai motor perekonomian yang menanamkan modalnya dengan mengambil resiko kerugian atas usahanya. Pasar yang dikehendaki sebagai alokator interaksi *supply* dan *demand* yang sempurna dan efisien adalah mekanisme pasar bebas.

Penegasan lain berlaku, yakni perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dinilai sebagai penyebab tantangan yang tidak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Ada sistem dimana negara memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengelola semua sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya, namun tetap tidak boleh terjadi praktik monopoli di pasar. Peran negara seminimal mungkin dan mengusahakan seluas-luasnya kebebasan bagi para pelaku ekonomi yang mengandalkan *self-interest*-nya (Huda, 2016). Untuk sampai pada pemenuhan kepentingan atau kesejahteraan individu, maka yang menjadi ciri dasar strategik pergerakan kapitalismen, yakni eksploitasi, akumulasi dan ekspansi, dengan prinsip menurut Rand (Huda, 2016), "*manusia hidup pertama-tama untuk diri sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain*". Dalam hal ini kapitalisme terkait asumsi akan kepentingan diri (*selfishness*), kebebasan individu, dan pasar bebas. Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar:

- 1) Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu.
- 2) Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demimeningkatkan status sosial ekonomi.
- 3) Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin.
- 4) Kebebasan melakukan kompetisi.
- 5) Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.

Dari keterangan-keterangan tersebut, terang bahwa kesejahteraan pada perspektif kapitalisme terbatas pada keberhasilan atau kesuksesan individu dalam memperoleh dan memanfaatkan dan memaksimalkan modal secara bebas. Orientasi kesejahteraan pada interese individual.

Selain perspektif individualistis, ada perspektif lain dengan prinsip sama rata sama rasa di dalam bidang ekonomi ataupun sekularisme radikal. Dengan prinsip tersebut, kesejahteraan yang diharapkan bukan bersifat pribadi. Perspektif ini bersinggungan secara logis dengan ideologi komunisme. Menurut ideologi komunis, kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara dan bangsa, komunisme merupakan hasil



perkembangan sosialisme yang tinggi. Orientasi komunisme adalah tercapainya masyarakat komunis yang makmur dan sejahtera, tanpa kelas social, dengan prinsip semua orang sama. Untuk tercapainya tujuan tersebut, ada fase diktator proletariat yang bertugas membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah, karena dianggap bertentangan dengan demokrasi yang ada.

Komunisme tidak memberikan penghargaan terhadap HAM. Secara politis pun komunisme tidak membuka peluang pada partai oposisi, dan Pada masa transisi komunis, dengan bantuan negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan diambil alih dan berada di bawah kontrol kekuasaan negara komunis. Ideologi komunisme bersifat atheis (Tuhan tidak ada) dan norma norma hidup tidak di atur oleh agama. Komunisme tidak menghargai manusia sebagai pribadi, malah menganggap setiap orang sederajat atau sama dalam hal kedudukan (Guru Ppkn, 2017). Dengan penguasaan negara atas fasilitas produksi, diharapkan setiap orang bisa memiliki hak yang sama untuk bisa terlibat mengelola alat-alat produksi dan bisa mengecap hasil secara bersama, tidak hanya yang bermodal (kapitalis).

Selain konsep kesejahteraan dari perpektif kapitalisme dan komunisme, **pancasila** sebagai ideologi bangsa Indonesia memberikan penekanan lebih pada kesejahteraan. Dalam pidato presiden Sukarno tanggal 1 Juni 1945 prinsip keadilan disinggung sebagai sila ke-4 pancasila, dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan ditempatkan sebagai sila ke-5 pancasila, yang redaksinya disempurnakan menjadi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat kesejahteraan menjadi tujuan nasional, yakni "...memajukan kesejahteraan umum" (mengandung prinsip keadilan), dan "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Kesejahteraan dari perspektif pancasila adalah kesejahteraan umum, dan bukan kesejahteraan pribadi atau individu tertentu. Kesejahteraan mengandung prinsip keadilan. Prinsip keadilan disinggung dalam sila kedua pancasila, yakni "kemanusiaan yang

adil dan beradab” dan sila kelima, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Kesejahteraan tidak bisa dimengerti tanpa keadilan sosial. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan umum atau keadilan sosial. Setiap orang harus mengalami dan merasakan keadilan, diperlakukan secara manusia. Kesejahteraan dipahami saat tercipta keadaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesejahteraan juga merupakan keadaan dimana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima pancasila). Kesejahteraan itu bukan milik individu, kelompok atau golongan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan menjadi tujuan nasional yang diperjuangkan untuk seluruh rakyat dan bukan individu tertentu atau suku, dan golongan tertentu.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial, maka ada beberapa penegasan yang dapat dipahami, antara lain:

- 1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”(Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945). Pemeliharaan yang dimaksudkan bukan dalam arti membiarkan untuk bertambah banyak, tetapi melakukan program pengentasan dan pemberdayaan sehingga mereka terlepas dari kondisi fakir, miskin, dan keterlantaran (Subekan, 2014).
- 2) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat (1)UUD 1945)
- 3) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945);
- 4) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;
- 5) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal33 Ayat (4) UUD 1945)

Dari uraian tersebut, terang bahwa pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang melihat kesejahteraan bukan dalam arti kesejahteraan individual-kolektif, tetapi kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah kesejahteraan yang ditempatkan sebagai tujuan pembangunan nasional yang diharapkan tercipta atas dasar Ketuhanan yang Mahaesa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

### 3. Dialektika Kesejahteraan: perspektif etikal

#### a. Negara Mesti Bagaikan Seorang Anak

Mencermati lebih dalam kutipan John F Kennedy dari filsuf Marcus Tullius Cicero (3 Januari 106 sM-7 Desember 43 sM), actor dan negarawan Romawi kuno (ahli pidato dan prosa), *“jangan tanyakan apa yang Negara perbuat untuk anda, tetapi tanyakan apa yang dapat anda perbuat untuk Negara”*, sesungguhnya sepadan dengan konsep kesejahteraan social. Banyak pemahaman keliru berdampak negatif pada keterlibatan aktif implementasi kewajiban bernegara. Lembaga pendidikan pun banyak yang mengalami ketiduran ilmiah. Banyak mahasiwa yang malas dan kurang berkreasi dan memacuh diri secara bertanggung jawab. Masyarakat pun melakukan hal yang sama muatannya berupa lemahnya etos kerja. Demikian juga, banyak daerah dengan administrasi pemerintahannya memperlihatkan kurangnya kualitas kinerja, atau terlihat tetapi terbungkus rapih secara *implicit* dalam kesan *“asal bapak senang”*. Oleh karena itu perlu pencucian budi.

Negara, bagaikan seorang anak kecil yang karena kehendak dari resiko perkawinan orang tua, lahir dan dikaruniai hak hidup, tumbuh, dalam lindungan orang tua. Hak asasi anak itulah yang menuntut kewajiban orang tua sebagai sebuah tanggung jawab. Kalau Negara adalah anak, maka masyarakat dan pemerintah adalah orang tua. Rakyat, bagi peneliti digambarkan sebagai seorang ibu, dan pemerintah adalah seorang bapak. Pada perspektif inilah, masyarakat dan pemerintah harus menjalankan kewajibannya untuk menghidupkan dan membesarkan Negara sehingga dapat

mencerminkan kualitas masyarakat dan pemerintahnya. Wajah Negara adalah wajah masyarakat dan pemerintahnya, sebagaimana istilah klasik, *"buah jatuh tidak jauh dari pohonnya"*. Mau jadi apakah anak itu kelak? Seperti apakah pribadinya: baik, cerdas, dan dapat unggul dalam bersaing? Jawabannya, tergantung kolaborasi hak dan tanggung jawab bapak-ibu. Karena kolaborasi hak dan kewajiban bapak-ibu akan menentukan kebaikan dan keberhasilan anak. Hal yang sama pun berlaku bagi negara. Apa dan siapa negara itu? Negara akan baik dan sukses jika terjalin kooperatif hak dan kewajiban pemerintah-masyarakat. Penekanan tidak hanya hak saja atau kewajiban saja, tetapi pada korelasi proporsional hak dan kewajiban. Banyak orang hanya memfokuskan pada hak saja tanpa memperhatikan kewajiban, seperti kritikan John F Kennedy kepada warga Amerika untuk *"ask not what your country can do for you-ask what you can do for your country"* (The Telegraph, 2018). Kewajiban mesti diperhatikan dan jilankan secara efektif dan efisien untuk perolehan hak. Pada penekanan tertentu, hak menuntut realisasi kewajiban. Peranan orangtua sangat penting untuk pembentukan karakter positif anak. Demikian juga peran seluruh warga negara (masyarakat-pemerintah) sangat penting untuk pembentukan jati diri negara. Kesejahteraan pun mengena dan melingkupi kolaborasi kooperatif hak dan kewajiban semua pihak, bapa-ibu-anak atau masyarakat-pemerintah-negara. Jika semua pihak berperan secara maksimal apa yang menjadi kewajibannya dan jika semua pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka pada perspektif ini kesejahteraan dapat dirasakan bersama, sebagaimana dikenal prinsip orang Maluku, *"ale rasa, beta rasa, dia rasa, dan torang sama-sama rasa"*.

**b. Perlu Improvisasi Politis**

Selain implementasi kolaboratif-dialektis, pembangunan kesejahteraan umum tidak luput dari improvisasi politis. Hal ini mesti merupakan esensi daripada sekedar sebuah strategi. Bahwa improvisasi politis harus setiap saat ditempatkan dalam konteks membangun peradaban baru. Terang hanya mungkin kelihatan dalam kegelapan, kepintaran adalah fase

sesudah kebodohan, dan kedewasaan adalah fase kematangan yang bukan lagi kembali ke masa kekanak-kanakan. Improvisasi politis mengandung kebaruan dan bukan repetisi. Sementara perspektif strategis harus pada konteks prevensi terhadap repetisi. Sebab repetisi tidak lebih dari sebuah permainan dan biar perlu merupakan sebuah kebodohan.

Orde baru adalah sebuah kebaruan dari rezim lama, reformasi adalah fase lain dari jaman sebelumnya, dan pemerintahan presiden Jokowi adalah kebaruan dari pemerintahan lama. Kebaruan adalah selalu sebuah sintesis. Hal ini muncul dari sebuah proses pembentukan peradaban yang sifatnya progresif dan bukan siklis. Betul, bahwa reformasi saat itu hanya mungkin terjadi dengan kekuatan demonstrasi besar-besaran yang tidak luput dari reaksi anarkis; betul bahwa sebuah pemerintahan dapat digulingkan dengan kekuatan masa, yang dapat saja mengorbankan nyawa dan hak-hak kewarganegaraan. Akan tetapi jaman ini, mesti bukan merupakan jaman itu. Kalau biasanya demonstrasi selalu berdampak anarkis, apalagi dengan kekuatan masa yang terkoordinir tidak sedikit jumlahnya, mengapa tidak diantisipasi dan seakan dibiarkan? Lagi-lagi, ini bukan jamannya, itu lagu lama, basi....! Improvisasi politik diperlukan untuk sebuah kebaruan peradaban bangsa yang menjadi semakin dewasa dan matang. Improvisasi politis bermuara pada kesejahteraan umum.

**c. Keluarga adalah Negara dalam Bentuk Sempit**

Menjawab pertanyaan “apa yang engkau berikan kepada Negara...?” atau menjalankan kewajiban bernegara tidak mesti harus sibuk memikirkan nasib DKI, terlibat dalam berdemo ke Jakarta agar terkenal, menjadi pejabat public, dan menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi dalam status apapun dapat melakukan apa saja yang baik dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Sering kali banyak di antara kita tidak sadar bahwa, kualitas kepemimpinan seseorang dinilai dan diukur lewat keberhasilannya mengatur dan mengelola rumah tangganya. Demikian juga, moralitas dan kepribadian etis seseorang dapat dinilai melalui keluarga. Semakin sejahtera dan terhindar dari problem sebuah keluarga atau rumah tangga,

seseorang dapat dipandang layak untuk memikul tanggung jawab yang besar, termasuk dalam urusan menjadi pejabat public. Kesuksesan dan kesejahteraan keluarga menjadi barometer seseorang diyakini bisa berimprovisasi positif menciptakan kesuksesan dan kesejahteraan bagi Negara. Apa yang diperbuat untuk kesejahteraan keluarga, pada waktu yang sama menunjukkan apa yang telah kita lakukan bagi Negara. Keluarga adalah Negara dalam arti sempit.

### KESIMPULAN

Kesejahteraan lazimnya merupakan pemenuhan barang, jasa, kepastian hukum untuk keseimbangan dan kenyamanan, akan tetapi bukan untuk kepentingan individual-kolektif, tetapi kepentingan umum. Kesejahteraan membangun gerakan altruistis dan bukan egoistis-individualistis. Kesejahteraan atau keadilan social hanya mungkin tercipta jika ada kolaborasi hak dan kewajiban secara proporsional bapak-ibu-anak, atau pemerintah-masyarakat-negara. Kesejahteraan membutuhkan improvisasi positif untuk terciptanya peradaban baru sebagai sebuah sintesis dan bukan repetisi. Kesejahteraan bukan berarti bersenang-senang karena telah terpenuhi kebutuhan apa lagi di atas penderitaan orang lain. Kesejahteraan umum atau keadilan sosial menuntut pemberdayaan, maksimalisasi kinerja, tingkatkan etos kerja sebagai bagian dari identitas manusia sebagai "*homo vaber*" untuk sebuah keadaan di mana "*ale rasa, beta rasa, dia rasa, dan torang semua rasa*". Artinya, kesejahteraan bersama (*communal well-being, bonnum comunio*). Dialektika kesejahteraan mengandung pengertian improvisasi-kolaboratif berbagai pihak (*stakeholders*) demi kesejahteraan bersama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fajriha, N. (2020, Januari 25). *Dampak Virus Korona ke Indonesia*. Retrieved Mare 19, 2020, from Liputan6 Web site: <https://www.liputan6.com>
- GuruPpkn. (2017, Juli 6). Dipetik Desember 4, 2018, dari GuruPpkn Web site: <https://www.guruppkn.com>
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktip-pada-2017>

- <http://nasional.kompas.com>. (2017, 28 12). Diambil kembali dari <http://nasional.kompas.com>
- Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan Kapitalisme. *economica*, 27-49.
- Ikhwan, B. A. (2015). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Kompas.com. (2018, September Kamis).
- Kompas.com. (2018, Juni 22).
- Kunio, Y. (1990). *Capitalism Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Murphy, Robert P; Clemens, Jason; Palacios, Milagros; Veldhuis, Niels;. (2014). *Economics Principles for Prosperity*. (hal. 1-150). Canada: [www.fraserinstitute.org](http://www.fraserinstitute.org).
- Phoenix, T. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Baru*. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix.
- Rand, A. (1970). *Capitalism: The Unkown Ideal*. New York: A Single Book.
- Subekan, A. (2014, September 22). *Kemenkeu*. Dipetik Desember 5, 2018, dari Kemenkeu Web site: <https://bppk.kemenkeu.go.id>.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- The Telegraph*. (2018, November 28). Dipetik Desember 4, 2018, dari The Telegraph Web site: <https://www.telegraph.co.uk>
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1974, asal 2 ayat 1. (t.thn.).
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (t.thn.). Dipetik 09 17, 2018, dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas Beb site: <http://wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>.